

IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS/AQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME (HIV/AIDS) PADA PUSKESMAS PARINGIN SELATAN KABUPATEN BALANGAN

Lusi Maulida¹, Arif Budiman², Siti Paulina³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

E-mail : lusimaulida4@gmail.com

ABSTRAK

Untuk mencegah dan menanggulangi kasus HIV/AIDS di Kabupaten Balangan, implementasi program pencegahan di Puskesmas Paringin Selatan masih menghadapi beberapa tantangan. Stigma dan diskriminasi masyarakat terhadap penyakit ini masih tinggi, dan kurangnya prasarana seperti media penyuluhan leaflet menjadi kendala. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melibatkan 14 responden. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan dianalisis menggunakan berbagai teknik analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pencegahan HIV/AIDS di Puskesmas Paringin Selatan efektif, namun masih terdapat kekurangan dalam sumber daya dan komunikasi. Faktor pendukung implementasi program meliputi komitmen pemangku kebijakan, keterlibatan lintas program dan lintas sektor, serta partisipasi masyarakat. Namun, stigma dan diskriminasi masyarakat menjadi faktor penghambat. Untuk meningkatkan implementasi program, disarankan agar Dinas Kesehatan dan pengelola program Puskesmas memperkuat informasi tentang HIV/AIDS, kelompok berisiko melakukan skrining rutin, dan masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan dan implementasi program pencegahan ini.

Kata Kunci : Implementasi, Program Pencegahan, HIV/AIDS

ABSTRACT

To prevent and overcome HIV/AIDS cases in Balangan Regency, the implementation of prevention programs at the South Paringin Health Center still faces several challenges. Community stigma and discrimination against this disease are still high, and the lack of infrastructure such as leaflet counseling media is an obstacle. This study used qualitative descriptive method involving 14 respondents. Data were collected through interviews, observation, and documentation, and analyzed using a variety of analytical techniques. The results showed that the HIV/AIDS prevention program at Puskesmas Paringin Selatan was effective, but there was still a lack of resources and communication. Factors supporting program implementation include policy stakeholder commitment, cross-program and cross-sector involvement, and community participation. However, stigma and societal discrimination are inhibiting factors. To improve program implementation, it is recommended that the Health Office and Puskesmas program managers strengthen information about HIV/AIDS, at-risk groups conduct routine screening, and communities participate in the planning and implementation of this prevention program.

Keywords : Implementation, Prevention Program, HIV/AIDS

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menjamin hak setiap warga negara untuk kehidupan yang baik, sehat, dan sejahtera. HIV/AIDS adalah virus yang melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia. Program HIV termasuk dalam Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan. Di Kabupaten Balangan, capaian kinerja program HIV belum mencapai 100% dari tahun 2019 sampai 2022, meskipun pemerintah daerah diwajibkan mencapai mutu pelayanan 100% sesuai dengan peraturan. Pemerintah Kabupaten Balangan menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022. Untuk mengatasi masalah HIV/AIDS, Pemerintah Kabupaten Balangan telah menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) PMK No. 4 tahun 2019. Namun, implementasi kebijakan ini belum mencapai target yang ditentukan. Beberapa permasalahan yang terjadi di Kabupaten Balangan termasuk minimnya informasi di wilayah terpencil seperti Desa Telaga Purun dan Desa Binjai, stigma dan diskriminasi masyarakat terhadap HIV/AIDS, serta kurangnya prasarana dalam program pencegahan HIV seperti leaflet penyuluhan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mendalami implementasi kebijakan ini di Kabupaten Balangan.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Bandar Lampung belum berjalan dengan baik. Amanda Ramadani (2017) menemukan bahwa indikator sumber daya dan sarana prasarana pada Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bandar Lampung belum terpenuhi dengan baik karena jumlah personil yang minim. Selain itu, SOP dalam indikator Struktur birokrasi juga belum memiliki standar operasional prosedur secara khusus. Meskipun demikian, kegiatan ini akan dibantu oleh stakeholder terkait. Sebagai kesimpulan, implementasi penanggulangan HIV/AIDS oleh KPA Kota Bandar Lampung belum berjalan sepenuhnya dengan baik (Ramadani, 2017). Eko Pratama (2018) juga melakukan penelitian serupa di Kota Palembang. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan HIV/AIDS di kota ini cukup baik. Keempat dimensi implementasi kebijakan yang digunakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, sudah berjalan dengan baik. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti tidak adanya SOP khusus dalam aspek struktur birokrasi. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut antara lain dengan menetapkan kriteria pemerintah pelaksana kebijakan yang harus memiliki dedikasi yang tinggi, demokratis, dan jujur. Dinas Kesehatan juga berkoordinasi dengan forum Warga Peduli AIDS dan melakukan pembagian tugas/peran dengan SKPD atau pihak terkait seperti KPA, Dinas Pendidikan, dan Puskesmas. Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Palembang telah berjalan efektif, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi (Pratama, 2018).

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan yang telah ditentukan harus diimplementasikan agar dapat terwujud. Implementasi kebijakan melibatkan konflik, keputusan, dan penerimaan hasil kebijakan. Implementasi kebijakan harus disertai dukungan sarana yang dapat memberikan dampak pada tujuan yang diinginkan. Menurut Edward, implementasi kebijakan merupakan tahap pembuatan kebijakan yang menghasilkan konsekuensi bagi masyarakat. Jika implementasi kebijakan tidak tepat, maka kebijakan tersebut dapat mengalami kegagalan (Subarsono, 2020). Mazmania dan Sabatier menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah usaha untuk memahami peristiwa dan kegiatan yang terjadi setelah kebijakan tersebut dijalankan (Dyah Mutiarin dan Arif Zaenudin, 2014).

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang penting dalam struktur kebijakan karena menentukan apakah kebijakan yang diterapkan sesuai dengan tujuan yang direncanakan.

Implementasi kebijakan harus dilakukan agar mencapai dampak dan tujuan yang diinginkan. Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan individu, pejabat, atau kelompok yang bertujuan mencapai tujuan kebijakan (Mulyadi, 2016). Implementasi kebijakan melibatkan tiga hal, yaitu tujuan kebijakan, aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan hasil kegiatan. Konsep implementasi kebijakan mencakup aktivitas dinamis dalam melaksanakan program serta menetapkan tujuan kebijakan untuk mencapai hasil yang sesuai. Implementasi kebijakan publik adalah proses dinamis di mana kegiatan dilakukan untuk mencapai tujuan kebijakan. Implementasi kebijakan publik terjadi ketika pemerintah mengatasi masalah masyarakat melalui keputusan-keputusan yang diterapkan, dilaksanakan, dan dievaluasi melalui tahap-tahap tertentu .

Model implementasi kebijakan, yang dikembangkan oleh George C. Edwards III, dijelaskan oleh Subarsono (2020:90) bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel. Pertama, komunikasi yang baik antara pembuat keputusan dan implementor sangat penting untuk mencapai tujuan kebijakan. Kedua, keberhasilan implementasi juga dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia dan finansial. Ketiga, disposisi implementor yang baik, seperti komitmen dan kejujuran, sangat mendukung kebijakan. Terakhir, struktur organisasi, termasuk prosedur operasi standar (SOP), turut mempengaruhi implementasi kebijakan. (Subarsono, 2020)

HIV/AIDS adalah penyakit menular yang belum memiliki vaksin atau obat yang efektif dalam pencegahan HIV/AIDS. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan dapat menyebabkan AIDS setelah lima hingga sepuluh tahun atau lebih. AIDS menyebabkan sistem kekebalan tubuh menjadi lemah dan dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit. Meskipun belum ada pengobatan yang dapat menyembuhkan HIV secara menyeluruh, obat dapat memperlambat perkembangan penyakit dan meningkatkan harapan hidup penderita. Penggunaan obat Antiretroviral (ARV) telah memperbaiki pengobatan HIV dan AIDS dengan menurunkan angka kematian dan meningkatkan kualitas hidup penderita. Saat ini, HIV dan AIDS dapat dikendalikan dan tidak lagi dianggap sebagai penyakit yang menakutkan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber Data diambil secara *purposive* sebanyak 14 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponen, dan analisis tema. Adapun uji kredibilitas data adalah perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, dan analisis kasus negatif. (Sugiyono, 2014).

PEMBAHASAN

Komunikasi

Komunikasi adalah pertukaran informasi, ide, atau perasaan antara individu atau kelompok melalui berbagai cara, seperti kata-kata, ekspresi wajah, atau media elektronik. Komunikasi dalam pencegahan HIV/AIDS melibatkan strategi yang efektif untuk menyampaikan informasi dan membangun kesadaran seseorang.

Sosialisasi kebijakan adalah proses penyampaian, penyebaran, dan pemahaman terhadap suatu kebijakan kepada berbagai pihak yang terlibat atau terpengaruh. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan, implikasi, dan tindakan yang diperlukan terkait dengan kebijakan tersebut. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa pengetahuan Masyarakat tentang pencegahan HIV/AIDS sudah terimplementasikan.

Komunikasi antar pelaksana kebijakan dalam implementasi program pencegahan HIV/AIDS merujuk pada pertukaran informasi, arahan, dan koordinasi antara mereka yang terlibat dalam menjalankan kebijakan tersebut. Hal ini mencakup berbagai tingkatan, seperti komunikasi antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan efektivitas dan keselarasan langkah-langkah dalam program pencegahan HIV/AIDS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan Puskesmas Paringin Selatan dalam pelaksanaan komunikasi antar pelaksana kebijakan sudah sesuai dengan PERMENKES No 23 Thn 2022.

Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan Sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan Sarana prasarana. Sumber Daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumentasi saja.

Sumber daya manusia adalah salah satu yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi sudah terimplementasikan dimana koordinasi antar instansi pelaksana dalam melaksanakan program yang mana adanya pengawasan yang dilakukan pelaksana serta memberikan adanya hasil yang baik.

Sumber daya finansial mencakup semua aset keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh suatu entitas, seperti perusahaan atau individu. Ini termasuk uang tunai, investasi, hutang, dan setiap bentuk kekayaan yang memiliki nilai moneter. Sumber daya finansial menjadi kunci dalam menjalankan aktivitas bisnis, investasi, dan pemenuhan kebutuhan finansial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama antar instansi dan puskesmas berjalan dengan baik dan saling memberi saran serta masukkan antar pengelola program kabupaten dan pengelola program puskesmas.

Sarana adalah alat atau benda-benda yang bergerak sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk alat atau benda-benda yang tidak bergerak. Prasarana adalah segala sesuatu yang menunjang secara langsung atau tidak langsung segala jenis sarana. Umumnya prasarana dimiliki dan dibangun oleh pemerintah dalam bentuk benda tidak bergerak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prasarana yang ada di Puskesmas Paringin Selatan tidak terimplementasikan karena tidak cukupnya prasarana yang ada pada Puskesmas Paringin Selatan.

Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokrasi. Disposisi didefinisikan sebagai kesepakatan atau kecenderungan keinginan pelaksana untuk kebijakan.

Kesadaran pelaksana mencakup perhatian terhadap detail, fokus pada kualitas, dan tanggung jawab terhadap hasil kerja yang dihasilkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pelaksana sudah terimplementasikan dengan baik. Kegiatan yang dilakukan Puskesmas Paringin Selatan akan melakukan kegiatan program sesuai dengan aturan.

Komitmen adalah sikap yang mencerminkan sejauh mana seorang individu mengenal dan terkait pada organisasinya. Pegawai-pegawai yang merasa lebih berkomitmen pada organisasi memiliki kebiasaan-kebiasaan yang bisa diandalkan, dan berusaha untuk tinggal lebih lama dalam

organisasi, dan mencurahkan lebih banyak upaya dalam berkerja. Hasil penelitian ini menunjukkan Puskesmas Paringin Selatan sudah berkomitmen dengan baik.

Tidak diskriminatif adalah sikap atau tindakan yang menunjukkan ketidak berpihakan atau ketidak diskriminan terhadap individu atau kelompok tertentu. Dalam konteks pencegahan HIV, sikap tidak diskriminatif mencakup perlakuan yang adil dan tanpa prasangka terhadap individu yang terlibat dalam perilaku berisiko atau yang hidup dengan HIV/AIDS. Hasil penelitian ini menunjukkan Puskesmas Paringin Selatan memberikan privasi pasien terjaga dengan baik serta memberikan informasi secara maksimal tentang stigma dan diskriminasi terhadap penyakit HIV/AIDS.

Struktur Biokrasi

Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur.

Mekanisme atau Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah panduan tertulis yang menjelaskan langkah-langkah yang harus diikuti dalam menjalankan suatu proses atau tugas secara konsisten. Standar Operasional Prosedur juga berperan dalam menyediakan panduan yang jelas bagi personel, meminimalkan risiko kesalahan, dan menciptakan konsistensi dalam pelaksanaan tugas. Hal ini dapat mencakup deskripsi tugas, langkah-langkah spesifik, aturan keamanan, tanggung jawab, dan prosedur penyelesaian masalah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme atau standar operasional prosedur (SOP) sudah terimplementasikan dengan baik, dengan adanya Standar Operasional Prosedur kegiatan program berjalan terarah.

Struktur organisasi pelaksana adalah kerangka atau susunan yang menetapkan hubungan hierarki dan tanggung jawab antara berbagai unit atau bagian dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Struktur organisasi pelaksana mencakup pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab di antara anggota organisasi. Ini dapat berbentuk hirarki tradisional dengan tingkat manajemen yang jelas atau struktur yang lebih fleksibel seperti organisasi matriks, fungsional, atau berbasis proyek, tergantung pada jenis dan kompleksitas kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Tujuannya adalah memastikan koordinasi yang efisien dan pencapaian sasaran organisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengurusan dalam hal ini kegiatan birokrasi harus lebih dahulu melalui beberapa tahap. Untuk pembagian struktur organisasi pelaksana Implementasi yang baik. Kerja sama antara bagian Masyarakat, pemerintahan dan tanggung jawabnya.

Pengawasan adalah proses pemantauan, evaluasi, dan pengendalian aktivitas organisasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pemantauan kinerja, identifikasi perbedaan antara hasil yang diharapkan dan yang sebenarnya, serta pengambilan tindakan korektif jika diperlukan. Tujuannya adalah memastikan efisiensi, efektivitas, dan keselarasan dengan tujuan organisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang baik harus dilakukan terus menerus agar keberlangsungan program berjalan dengan baik dan sudah terimplementasikan dengan baik juga.

Kompetensi petugas mencakup kombinasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan untuk berhasil dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang bidang pekerjaan, kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut, serta sifat-sifat pribadi yang mendukung kinerja yang baik. Dengan memiliki kompetensi yang relevan, petugas dapat lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tanggung jawab mereka.

Selain itu, kompetensi petugas juga melibatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, bekerja sama dalam tim, berkomunikasi secara efektif, dan mengatasi tantangan yang muncul. Pengembangan kompetensi secara terus-menerus melalui pelatihan dan pengalaman kerja

dapat meningkatkan kinerja petugas dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata laksana tugas akan berjalan dengan baik apabila kompetensi petugas sudah memahami tugasnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Impelementasi Program Pencegahan Human Immunodeficiency Virus/Aqcquired Immunodeficiency Syndrome (HIV/AIDS) Pada Puskesmas Paringin Selatan Kabupaten Balangan.

1. Faktor Pendukung adalah adanya Komitmen pemangku kebijakan, Keterlibatan lintas program, lintas sektor, tokoh Masyarakat, ODHIV, serta orang-orang yang berisiko.
2. Faktor penghambat adalah Masih kentalnya Stigma dan Diskriminasi Masyarakat terhadap penyakit HIV/AIDS.

SIMPULAN

Implementasi Program Pencegahan HIV/AIDS di Puskesmas Paringin Selatan, Balangan, terbukti efektif. Komunikasi antar pelaksana kebijakan telah terimplementasikan dengan baik, termasuk kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dan sekolah setiap tahun. Namun, sarana prasarana belum sepenuhnya terpenuhi, seperti ketiadaan leaflet tentang HIV/AIDS. Sumber daya masih perlu ditingkatkan. Pengelola program HIV selalu melakukan sosialisasi rutin dan skrining kelompok berisiko secara bulanan. Mekanisme dan Standar Operasional Procedure juga telah diterapkan dengan baik, memastikan tugas-tugas dilakukan sesuai aturan untuk hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.
- Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.
- Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.
- Affrian, R. and Walinda, R. (2020) 'Komunikasi Program Imunisasi Vaksin Measles Rubella Puskesmas Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 1(1), pp. 42–50.
- Ahdiat, R. and Afrilla, P.N.A.N. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KABUT ASAP DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2518–2529.
- Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.
- Anjasmari, N.M.M. and Hasna, N.O. (2023) 'EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), pp. 4457–4465.
- Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang

Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administratus*, 8(2), pp. 56–68.

Dyah Mutiarin dan Arif Zaenudin (2014) *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.

Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.

Mulyadi, D. (2016) *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Pratama, E. (2018) *Implementasi Kebijakan Tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Palembang*. Universitas Sriwijaya.

Ramadani, A. (2017) *Implementasi Penanggulangan HIV/Aids Di Bandar Lampung (Studi pada Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bandar Lampung)*. UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG.

Riadi, S., Ahdiat, R. and Hidayatullah, G.M. (2023) 'PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STUDI KASUS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN PADA PASAR INDUK AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al'iidara Balad*, 5(1), pp. 25–30.

Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.

Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.

Subarsono (2020) *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Sugiyono (2014) *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Urahmah, N. and Isma, I. (2023) 'IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) BATAS USIA PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA PASAR SENIN DAN DESA RANTAWAN, KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), pp. 5494–5500.

Urahmah, N., Ulfah, R. and Riyanor, R. (2022) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR (BABS) DI KECAMATAN BANJANG (STUDI KASUS DESA KALINTAMUI, KALUDAN BESAR, PALANJUNGAN SARI)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), pp. 849–855.